

**PENGARUH KUALITAS INFORMASI KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

SITI KEMALA SARI TAMBUNAN

NPM : 148330042



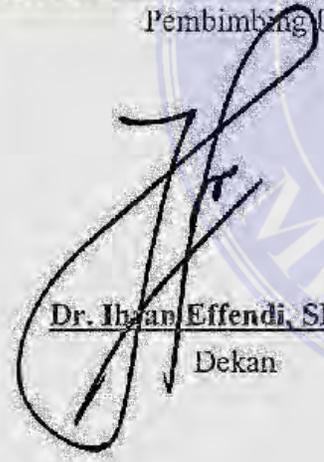
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

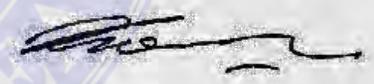
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Medan
Nama : Siti Kemala Sari Tambunan
NPM : 14.833.0042
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Hj. Saribulan Tambunan, SE, MMA
Pembimbing I


Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA
Pembimbing II


Dr. Ilham Effendi, SE, M.Si
Dekan


Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 26 September 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulis ilmiah.

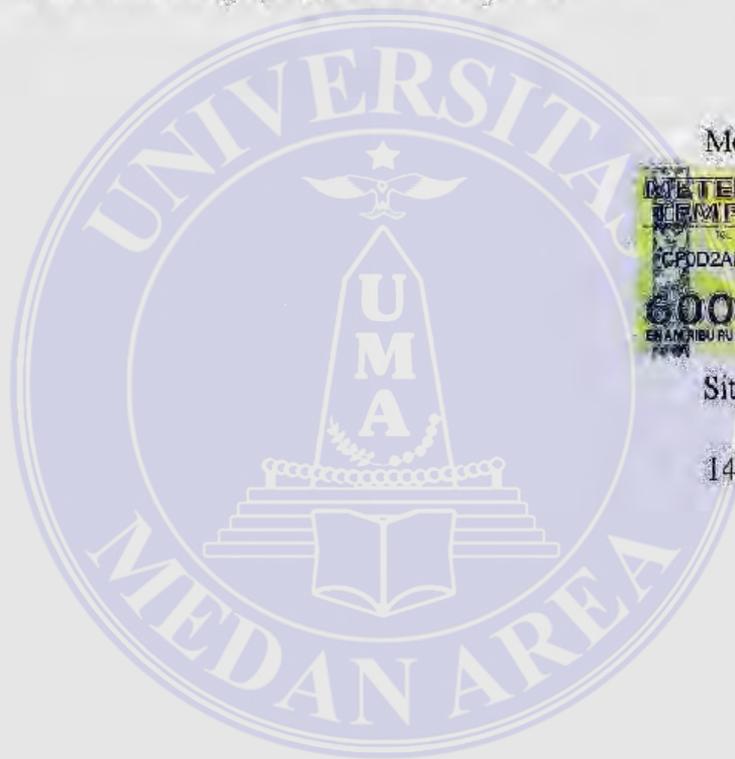
Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 September 2018



Siti Kemala Sari Tambunan

148330042



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Kemala Sari Tambunan

NPM : 148330042

Program Study : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Tugas Akhir /Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atau karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh Kualitas Informasi Kenangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Medan**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengallih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 20 Desember 2018

Yang menyatakan

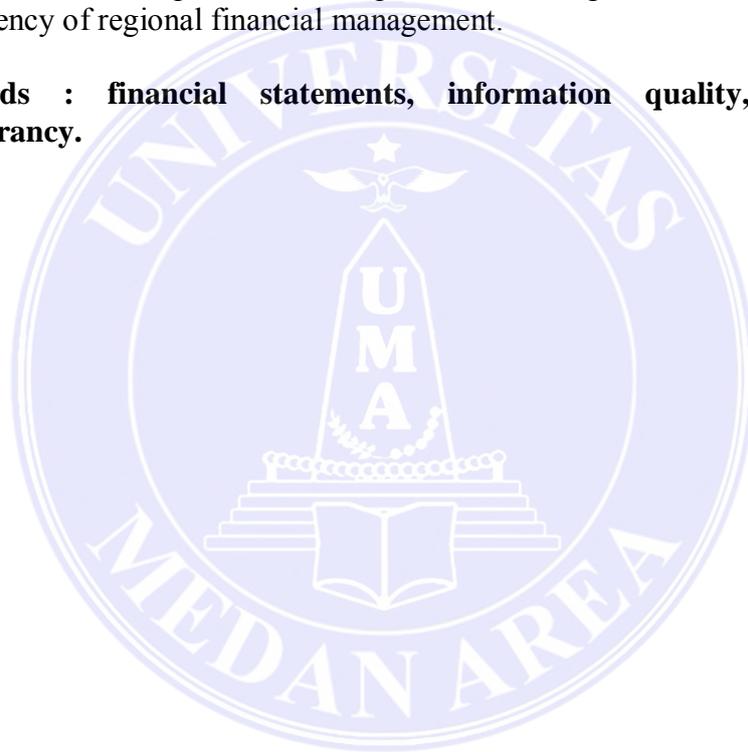


(Siti Kemala Sari Tambunan)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the influence of the quality of regional financial information and accessibility of regional financial reports on transparency of regional financial management in the city government of Medan. This type of research is causal associative research which is tested using multiple regression analysis. The type of data collected by the author is primary data by collecting data through a questionnaire that has been filled in by the respondents. Measurement of variables in this study used a five-point Likert scale. The number of samples in this study were 48 respondents. The results showed that simultaneous presentation and accessibility of regional financial reports had a positive and significant effect on transparency in regional financial management. Partially, the quality of financial information and the accessibility of regional financial reports have a positive and significant influence on the transparency of regional financial management.

Keywords : financial statements, information quality, accessibility, transparency.



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kualitas informasi keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal yang diuji menggunakan analisis regresi berganda. Jenis data yang dikumpulkan penulis adalah data primer dengan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang telah diisi oleh responden. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan lima poin skala Likert. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 48 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Secara parsial, kualitas informasi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci : laporan keuangan, kualitas informasi, aksesibilitas, transparansi.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, pada tanggal 25 Maret 1997 dari ayah Syah Arifin Tambunan dan ibu Yani Roni Manik. Penulis merupakan putri kandung dari 2 bersaudara.

Tahun 2014 Penulis lulus dari SMA Negeri 4 Medan dan pada tahun 2014 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Medan,” guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan serta dukungan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Terutama penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis Bapak **Syah Arifin Tambunan** dan Ibu **Yani Roni Manik**. Terima kasih atas semua kasih sayang, do'a, dukungan, didikan, dan semangat yang sangat berarti. Semoga penulis dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Kemudian kepada kakak- kakak penulis, Siti Sophia Aryani Tambunan dan Rahmadhani Fitri Harahap. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng,M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Yang terhormat Bapak Dr. H. Ihsan Effendi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Bapak Hery Syahrial, S.E, M.Si. selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

4. Bapak Ilham Ramadhan NST, SE, Ak, M.Si, CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
5. Ibu Hj. Saribulan Tambunan, SE, MMA selaku dosen pembimbing I, Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA selaku dosen pembimbing II, dan Ibu Hasbiana Dalimunthe, S.E., M.Ak selaku sekretaris, yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
7. Pemerintah Kota Medan yang telah bersedia membantu pengisian kuesioner pada penulisan skripsi ini, semoga skripsi saya dapat bermanfaat bagi Pemko Medan.
8. Teman-Teman penulis, Kiki Aldama, Ika Lastiar, Putri Dwi Anggreini dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas waktu, bantuan, dan motivasi yang diberikan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi.

Medan, 26 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	5
2.1 Teori-Teori	5
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan	5
2.1.2 Karakteristik, Jenis dan Manfaaat Laporan Keuangan	7
2.1.3 Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan	12
2.1.4 Pengertian dan Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan	14
2.1.5 Arti Penting dan Unsur-Unsur Transparansi Pengelolaan Keuangan	15
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	16

2.3	Kerangka Konseptual.....	18
2.4	Hipotesis	20
BAB III METODE PENELITIAN		21
3.1	Jenis Penelitian	21
3.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	21
3.2.1	Definisi Operasional	21
3.2.2	Pengukuran Variabel.....	26
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian.....	27
3.4	Jenis Data.....	28
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	28
3.6	Analisis Data.....	29
3.6.1	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	29
	a. Uji Validitas.....	29
	b. Uji Reliabilitas.....	30
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	30
	a. Uji Normalitas.....	30
	b. Uji Multiikolinearitas	31
	c. Uji Heteroskedastisitas	32
3.6.3	Pengujian Hipotesis.....	33
	a. Uji parsial (Uji-t).....	34
	b. Uji Simultan (Uji-F)	34
	c. Adjusted R ²	35
3.6.4	Tempat dan Waktu Penelitian	36
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN.....		37

4.1	Data Penelitian	37
4.1.1	Sejarah Singkat Kota Medan	37
4.1.2	Letak Geografis	38
4.2	Analisis Data	39
4.2.1	Identitas Responden	39
4.2.2	Presentase Jawaban Responden	41
4.2.3	Analisis Statistik	45
	a. Uji Validitas dan Reliabilitas	45
	b. Uji Asumsi Klasik	48
	1. Uji Normalitas	48
	2. Uji Heteroskedasitas	51
	3. Uji Multikolinearitas	53
	c. Uji Hipotesis	54
	1. Uji Regresi Linear Berganda	54
	2. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)	55
	3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	57
	4. Uji Koefisien Determinan (R^2)	59
4.2.4	Pembahasan	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Keterbatasan Penelitian	63
5.3	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		67

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
II.1	Penelitian Terdahulu	16
III.2	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	25
III.3	Jadwal Penelitian	36
IV.4	Karakteristik Responden Usia.....	40
IV.5	Karakteristik Responden Jenis Kelamin.....	40
IV.6	Karakteristik Responden Pekerjaan.....	40
IV.7	Karakteristik Responden Pendidikan Terakhir.....	41
IV.8	Presentase Jawaban Variabel X1.....	41
IV.9	Presentase Jawaban Variabel X2.....	43
IV.10	Presentase Jawaban Variabel Y.....	44
IV.11	Hasil Uji Validitas X1.....	46
IV.12	Hasil Uji Validitas X2.....	47
IV.13	Hasil Uji Validitas Y.....	47
IV.14	Statistik Reliabilitas.....	48
IV.15	Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov.....	51
IV.16	Hasil Uji Glejser.....	53
IV.17	Hasil Uji Multikolinearitas.....	53
IV.18	Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	54
IV.19	Hasil Uji Parsial.....	56
IV.20	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F).....	58
IV.21	Hasil Uji Koefisien Determinan.....	59

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
II.1	Kerangka Konseptual	19
IV.2	Gambar Grafik Histogram.....	49
IV.3	Gambar P.Plot Normalitas.....	50
IV.4	Grafik Scatterplot.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul	Halaman
1.	Kuesioner.....	67
2.	Identitas Responden.....	69
3.	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	79
4.	Uji Regressi dan Asumsi Klasik.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena disektor publik meningkatkan perhatian masyarakat terhadap masalah transparansi dan aksesibilitas pengelolaan keuangan. Hal ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik. Setiap kebijakan pemerintah dituntut transparan agar pemerintahan yang bersih dapat diwujudkan demi tercapainya kehidupan yang adil dan sejahtera yang merata bagi seluruh rakyat. Masyarakat juga menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah harus mengelola keuangan daerah secara jujur dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan keuangan, sistem pengelolaan keuangan yang masa-masa pemerintahan sebelumnya bersifat sentralistik akhirnya diubah menjadi desentralistik seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Potensi keuangan yang dimiliki daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (UU No.32/2004 pasal 5 ayat 2).

Dengan demikian pemerintah daerah baik pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota harus melakukan pengelolaan keuangan yang menjadi

haknya berdasarkan perundang-undangan. Maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 4 ayat 1 PP No. 58/2005 menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 58 tahun 2005, Kementerian Dalam Negeri yang membawahi pemerintah daerah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam hal pelaporan, pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan dimaksud harus memberi akses yang mudah dan murah kepada masyarakat sebagai wujud transparansi, dan laporan keuangan daerah juga harus bisa berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berbagai paket regulasi tersebut diatas menunjukkan bahwa upaya pemerintah di bidang pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, upaya perbaikan tersebut tampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pada kenyataannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan “bahwa 90 % satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Indonesia belum bisa membuat laporan keuangan seperti laporan

realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan baik.”

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah kota Medan sebagai suatu entitas pelaporan masih mengalami kesulitan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Masalah lainnya adalah laporan keuangan masih cenderung dianggap sebagai dokumen rahasia sehingga publikasi atas laporan keuangan dimaksud, melalui internet, surat kabar atau akses publik lainnya belum menjadi hal yang umum untuk dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul : “Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Medan”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah kualitas informasi keuangan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah ?
- 1.2.2 Apakah Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah ?
- 1.2.3 Apakah kualitas informasi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah ?

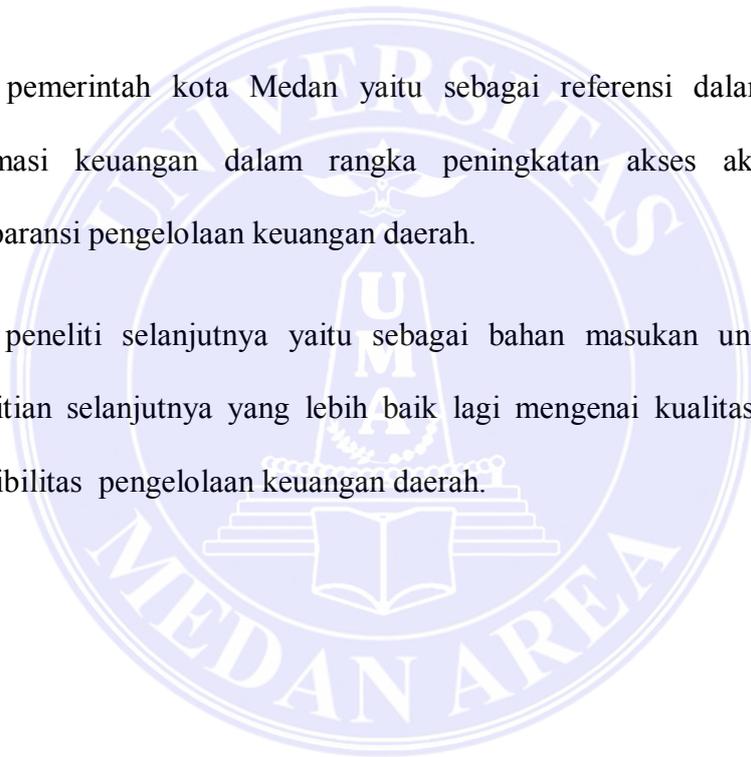
1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi pemerintah kota Medan yaitu sebagai referensi dalam hal kualitas informasi keuangan dalam rangka peningkatan akses aksesibilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi mengenai kualitas informasi dan aksesibilitas pengelolaan keuangan daerah.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Teori-Teori

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Kualitas informasi keuangan merupakan hal yang sangat *vital* bagi pemerintah. Menurut PP No. 24 Tahun 2005, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah terhadap kinerjanya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh *entitas* pelaporan selama satu periode pelaporan.

Menurut Diamond (2002), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan *akuntabilitas*. Kualitas informasi keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya *akuntabilitas* yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006). Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan *Ekuitas*, Catatan atas Laporan Keuangan .

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat (Permendagri No.13/2006 pasal 4 ayat 1). Definisi keuangan daerah sendiri disebutkan dalam Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 1 ayat 6 yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang

dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual No.1, paragraph 9, (PP No.71 tahun 2010) disebutkan bahwa : Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

2.1.2 Karakteristik dan Jenis Laporan Keuangan

Sebagai sumber informasi maka laporan keuangan harus mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut.

- a. Dapat Diahami. Laporan keuangan sebagai sumber informasi harus mudah dipahami oleh pemakai. Di sini diasumsikan bahwa pemakai telah memiliki pengetahuan tentang akuntansi dan aktivitas ekonomi yang lain.
- b. Relevan. Informasi dalam laporan keuangan harus relevan dalam memenuhi kebutuhan pemakai dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan dapat membantu para pemakai dalam mengevaluasi program kerja dan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- c. Andal. Laporan keuangan harus andal, dalam arti dari laporan keuangan menyajikan informasi yang jujur dan wajar. Jujur, maksudnya harus menggambarkan peristiwa atau aktivitas ekonomi yang seharusnya.
- d. Netral. Laporan keuangan harus netral, maksudnya informasi disajikan untuk kebutuhan umum pemakai dan tidak untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu.
- e. Dapat Dibandingkan. Laporan keuangan dapat digunakan oleh pemakai sebagai perbandingan dengan laporan keuangan pada periode-periode yang lain. Perbandingan laporan keuangan antarperiode bertujuan untuk mengidentifikasi posisi keuangan perusahaan. Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada konsep-konsep atau anggapan-anggapan tertentu, sehingga laporan keuangan tersebut mempunyai bentuk dan isi yang sudah tertentu pula.

Setidaknya, ada empat jenis laporan keuangan dalam akuntansi. Untuk mengetahui kondisi keuangan bisnis, Anda dapat mempelajari dan menggunakan laporan keuangan sebagai berikut:

a. Laporan Laba Rugi

Sesuai dengan namanya, jenis laporan keuangan ini berfungsi untuk membantu Anda mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. Apabila pendapatan perusahaan lebih besar daripada beban atau biayanya, maka bisnis memperoleh laba. Sebaliknya, jika pendapatan cenderung lebih kecil dari beban atau biayanya, maka kemungkinan besar bisnis mengalami kerugian.

Pada umumnya, ada dua cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi, yaitu *single step* (cara langsung) dan *multiple step* (cara bertahap). Metode *single step* relatif lebih mudah dibandingkan *multiple step*, Anda hanya perlu menjumlahkan seluruh pendapatan dari atas sampai bawah menjadi satu kelompok, kemudian mengurangnya dengan total beban atau biaya dalam periode yang berlaku.

Sedangkan, pada metode *multiple step*, pendapatan dipisah menjadi dua kategori, yaitu pendapatan operasional (yang berasal dari kegiatan pokok) perusahaan dan pendapatan non operasional (yang berasal dari luar kegiatan pokok) perusahaan. Pembagian kategori tersebut juga berlaku pada beban atau biaya.

b. Laporan Perubahan Modal

Dalam menjalankan operasional perusahaan, tentunya modal awal yang ditanam akan mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena modal harus digunakan dalam menjalankan roda perusahaan, juga karena adanya penambahan

dari laba yang didapat, penggunaan modal untuk kepentingan pemilik perusahaan, atau hal lainnya.

Laporan perubahan modal atau yang biasa disebut *Capital Statement* dalam istilah akuntansi merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Laporan perubahan modal ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi.

c. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca adalah jenis laporan keuangan ini menyajikan akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Neraca biasanya terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk skontro/horizontal (*account form*) dan bentuk vertikal/stafel (*report form*). Nilai modal pada neraca merupakan nilai yang tercatat pada Laporan Perubahan Modal. Keseimbangan pada neraca dapat tercapai karena pada Laporan Perubahan Modal sudah terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercatat pada Laporan Laba-Rugi.

- a. Aktiva, merupakan harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan (*future economic benefit*). Contohnya seperti truk, mobil kargo, dan mobil pengangkat barang, untuk perusahaan ekspedisi. Aktiva terdiri dari Aktiva Lancar (*Current Assets*) dan Aktiva Tetap Berwujud (*Tangible Fixed Assets*)
- b. Kewajiban, terdiri dari Utang Lancar (*Current Liabilities*) dan Utang Jangka Panjang (*Long Term Liabilities*).

- c. Modal, adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal akan bertambah jika pemilik perusahaan menambahkan investasinya ke dalam perusahaan dan jika perusahaan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, modal akan berkurang jika pemilik perusahaan mengambil dana investasinya (prive) dan jika perusahaan mengalami kerugian.
- d. Laporan Arus Kas

Jenis laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di perusahaan, kemana dana atau kas pergi dan dari mana kas masuk. Hal ini supaya perusahaan dapat mengontrol dana atau kas perusahaan yang dimiliki selama ini.

Laporan arus kas atau *Cash Flow* berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar. Laporan mengenai arus kas masuk dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman. Sedangkan arus kas keluar dapat dilihat dari berapa banyak beban biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk kegiatan operasional atau investasi pada bisnis lain.

Menurut Harahap (2010), manfaat pemakai laporan keuangan itu meliputi :Pihak perusahaan. pihak ini sangat berkepentingan untuk mengetahui laporan keuangan, karena laporan tersebut dapat menilai sukses tidaknya manajer dalam memimpin perusahaan. Laporan keuangan juga digunakan untuk menilai kemungkinan hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang, sehingga bisa untuk menaksir bagian keuntungan yang akan diterima pemilik.

- Manajer / Pemimpin Perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk menyusun kebijaksanaan yang lebih tepat, memperbaiki sistem yang telah dijalankan dan untuk menyusun sistem pengawasan yang lebih bagus.
- Investor. Penanam modal yang beresiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan.
- Karyawan. Karyawan dan kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan.
- Pemberi Pinjaman (kreditur). pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
- Pemasok dan Kreditur Usaha Lainnya, tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
- Pelanggan. Berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau tergantung pada perusahaan.
- Pemerintah. Pemerintah dan lembaga yang berada di bawah wewenangnya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktifitas perusahaan.
- Instansi Pajak. Perusahaan selalu memiliki kewajiban pajak sehingga perusahaan juga dikenakan pemotongan, perhitungan dan pembayaran.

- Analisis Pasar Modal. Analisis pasar modal selalu melakukan analisis tajam dan lengkap terhadap laporan keuangan perusahaan yang go public maupun yang berpotensi masuk pasar modal.
- Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktifitasnya.

2.1.3 Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website (internet)*, dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong *akuntabilitas* pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henley et al, 1990, dalam Rohman, 2009)

Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, pasal 103

dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya melalui publikasi media surat kabar, internet dan media lainnya. Informasi yang ditampilkan dalam SIKD tersebut dimana dinyatakan secara jelas pada pasal 102, UU No.33 tahun 2004 meliputi :

- a. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota
- b. Neraca daerah
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan daerah
- e. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
- f. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah
- g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (pasal 1 ayat 2) disebutkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau

penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2.14. Pengertian dan Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP, 2005).

Transparansi menjadi salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan PP 58/2005, sekaligus dapat menjadi kunci penyelenggaraan asas-asas lainnya.

Menurut Mardiasmo (2006), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Andrianto (2007) bahwa transparansi adalah : “Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dan sebuah lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik”. Transparansi publik mensyaratkan bahwa setiap pejabat publik berkewajiban membuka ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik dengan membuka akses dan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat (Pandji, 2008 : 56)

Prinsip Transparansi pada Pemerintahan dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :

1. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
2. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.5 Arti Penting dan Unsur-Unsur Transparansi Pengelolaan Keuangan

Ada tiga alasan mengenai pentingnya keterbukaan dengan penjelasannya sebagai berikut.

1. Keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi. Hal ini dapat menjadikan warga negara memiliki pemahaman yang jernih mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pada gilirannya warga negara mampu berpartisipasi aktif dalam memengaruhi agenda publik. Keterbukaan adalah prasyarat mutlak bagi adanya partisipasi yang konstruktif dan rasional.
2. Dasar penyelenggaraan pemerintahan di negara demokratis adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keberadaan pemerintah di negara demokratis dipahami sebagai pihak yang dipilih oleh rakyat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Berbagai aturan hukum di negara demokratis semaksimal mungkin diupayakan untuk keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin bahwa jalannya pemerintahan senantiasa berada di jalur yang benar, yakni untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

3. Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Pada umumnya penyelewengan kekuasaan terjadi dan semakin merajalela apabila tidak ada keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, negara-negara demokratis sangat menekankan pentingnya keterbukaan atau transparansi agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan dan tata pemerintahan yang tidak baik.

Empat unsur utama pemerintahan dikatakan terbuka (transparansi) yaitu :

1. Pemerintahan menyediakan berbagai informasi mengenai kebijakan yang ditempuhnya. Berbagai informasi itu antara lain, kebijakan pemerintah dan pertimbangan yang mendasari kebijakan tersebut, peraturan dan proses pelaksanaan kebijakan itu serta biaya dan dampak yang mungkin terjadi.
2. Masyarakat dan media massa memiliki kesempatan luas untuk mengetahui isi berbagai dokumen pemerintah baik secara langsung (melalui parlemen).
3. Terbukanya sidang pemerintah bagi masyarakat dan media massa. Keterbukaan itu menyangkut sidang eksekutif dan komisi- komisi, maupun notulen hasil rapat.
4. Adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintahan secara berencana.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mulyana (2006)	Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan	Penyajian daerah neraca (X1), aksesibilitas laporan	Secara terpisah dan atau bersama-sama penyajian laporan

		Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	keuangan daerah (X2), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2.	Hanim (2009)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian laporan keuangan daerah (X1), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3.	Saufi Iqbal Nasution (2010)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Penyajian laporan keuangan SKPD (X1), aksesibilitas laporan keuangan SKPD (X2), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD (Y)	Secara terpisah dan atau bersama-sama penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD
4.	Marjuki Sagala (2011)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemkab Samosir	Penyajian laporan keuangan daerah (X1), aksesibilitas laporan keuangan (X2), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	Secara terpisah dan atau bersama-sama penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
5.	Hani Nurhayani (2013)	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap	Penyajian laporan keuangan (X1), aksesibilitas laporan keuangan (X2), akuntabilitas	Secara terpisah dan atau bersama-sama penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan

		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemko Bandung	pengelolaan keuangan daerah (Y)	keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
--	--	--	------------------------------------	--

2.3 Kerangka Konseptual

Mardiasmo (2004:37) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

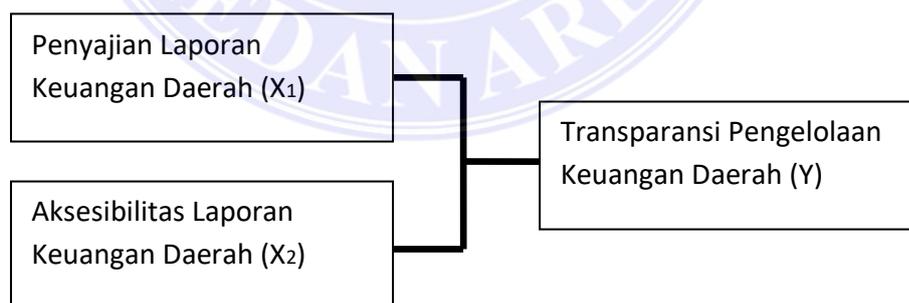
- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*) .
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasionalnya.

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola desentralisasi secara transparan, ekonomi, efisien dan akuntabel. Beberapa perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan yang memerlukan prioritas utama, agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan konsep *Value For Money* (VFM). Pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan konsep VFM tersebut adalah untuk menjamin dikelolanya uang rakyat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel agar pada akhirnya terwujud akuntabilitas publik (Soesastro 2005 : 553).

Hubungan antara Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah digambarkan dalam kerangka konseptual berikut :



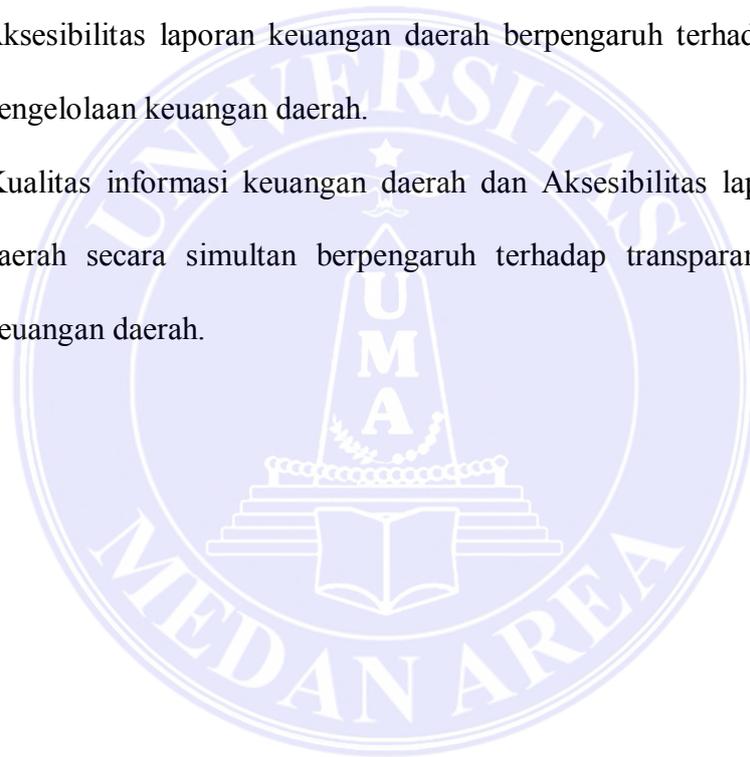
Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Kualitas informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- H2 : Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- H3 : Kualitas informasi keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal. “Desain Asosiatif Kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain” (Umar, 2003 : 30). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan kualitas informasi keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai variabel independen terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen. Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan hipotesis yang ada maka penelitian ini termasuk penelitian *design cross sectional* yaitu penelitian yang melibatkan perhitungan sampel untuk digeneralisir populasinya, melalui inferensial dimana variabel diteliti pada waktu yang bersamaan.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Definisi Operasional

Berdasarkan desain penelitian asosiatif kausal yang merupakan desain penelitian yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Kualitas Informasi Keuangan (X1)

Pada penelitian ini kualitas informasi keuangan berperan sebagai variabel independen (X1). Kualitas informasi keuangan dalam penelitian ini merupakan penyajian laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan entitas pelaporan yang memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini diadopsi dari Hanim (2009) yang berlandaskan pada PP No.71 tahun 2010 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan bahwa karakteristik-karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang dimuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan adalah :

1. Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

b. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)

Pada penelitian ini aksesibilitas laporan keuangan daerah berperan sebagai variabel independen (X2). Aksesibilitas laporan keuangan daerah dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Nasution (2010) yang berlandaskan pada Undang-Undang No.33 tahun 2004 pasal 103 dimana dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data yang terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat.

c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Pada penelitian ini transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini adalah kebebasan untuk mengakses informasi keuangan yang terbuka dan jujur secara menyeluruh dari pemerintah kepada masyarakat untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Hanim (2009). Ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

- a. Pengelolaan Keuangan diselenggarakan dengan sistem pengendalian internal yang memadai.
- b. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
- c. Adanya akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah.
- e. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani.

Tabel 3.1
Variabel penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran Variabel	Skala Penelitian
Variabel Dependen			
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Transparansi adalah kebebasan untuk mengakses informasi keuangan yang terbuka dan jujur secara menyeluruh dari pemerintah kepada masyarakat untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> o Sistem pengendalian intern o Penyebarluasan informasi o Akurasi dan kelengkapan informasi o Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil o Mekanisme pelaporan 	Penelitian ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (N=Netral), skor 2 (TS=tidak setuju), dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju).

Variabel Independen			
Kualitas Informasi Keuangan	Kualitas informasi keuangan adalah penyajian laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan entitas pelaporan yang terdiri atas LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> o Relevan : <ul style="list-style-type: none"> -manfaat umpan balik -manfaat prediktif -tepat waktu -lengkap o Andal o Dapat dibandingkan o Dapat dipahami 	Penelitian ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (N=Netral), skor 2 (TS=tidak setuju), dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju).
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	Aksesibilitas Laporan Keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi <i>stakeholder</i> untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi <i>stakeholder</i>	<ul style="list-style-type: none"> o Publikasi media masa o Kemudahan akses laporan keuangan o <i>Accesible</i> 	Penelitian ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (N=Netral), skor 2 (TS=tidak setuju), dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju).

3.2.2 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan 5 (lima) poin skala Likert. Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert yaitu dimana

responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan pernyataan mengenai perilaku, objek, atau kejadian (Kuncoro, 2003 : 157).

Jawaban responden akan diberi skor yaitu :

Skor 1 = Sangat tidak setuju

Skor 2 = Tidak setuju

Skor 3 = Netral atau ragu-ragu

Skor 4 = Setuju

Skor 5 = Sangat setuju

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2006 : 89) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan instansi yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit analisis. Jumlah SKPD yang menjadi populasi adalah sebanyak 48 SKPD di Pemerintahan Kota Medan.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2006 : 56). Sampel dalam penelitian ini diambil secara random dari setiap stratum. Oleh karena populasi memiliki karakteristik tugas pokok dan fungsi (tupoksi) maka penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *stratified random sampling*. Dengan teknik *stratified random sampling* diharapkan setiap anggota sub populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, sehingga sampel yang dipilih dapat mewakili seluruh sub populasi.

Adapun pertimbangan yang ditentukan oleh penulis dalam pengambilan sampel adalah :

- 1) Pegawai eselon III yang menjabat sebagai Sekretaris dan kepala bidang dari masing-masing SKPD merupakan penanggung jawab langsung dalam penyusunan laporan keuangan SKPD.
- 2) Pegawai eselon IV yang menjabat sebagai kepala sub bagian dan kepala sub bidang dari masing-masing SKPD merupakan staf yang membantu kepala bidang dalam penyusunan laporan keuangan SKPD.

3.4 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil kuosioner yang telah diisi oleh responden, yaitu Kabid dan Kasubag dari masing-masing SKPD yang menjadi sampel penelitian.
- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu catatan, ataupun laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kuosioner yaitu memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Instrumen dalam kuosioner merupakan replikasi dari peneliti-peneliti terdahulu yaitu oleh Hanim (2009) dan Nasution (2010). Adapun langkah-langkah pengumpulan data dan penyebaran kuosioner adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner dikirim ke seluruh sampel yang merupakan anggota populasi yang menjadi responden.
2. Setelah satu minggu, peneliti mengumpulkan kuesioner yang telah diisi oleh responden.
3. Setelah batas waktu yang ditentukan dan kuesioner telah dikembalikan oleh responden, peneliti kemudian melakukan pengolahan data jika jumlah kuesioner yang terkumpul sudah lebih dari 30, tetapi jika data belum mencukupi maka dicoba lagi untuk mengirimkan kuesioner kepada responden yang belum mengembalikan kuesioner.

3.6 Analisis Data

3.6.1 Uji Validitas dan reliabilitas

a. Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurinya (Ancok, 1998 : 120). Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain kepatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner (Hakim : 1999 dalam widyastuti : 2000). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel, maka butir pertanyaan tersebut valid
- 2) Jika r hitung negatif atau r hitung $<$ r tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid
- 3) r hitung dapat dilihat pada kolom *Corrected Item Total Corelation*

Nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = $n-k$, dimana :

n = Jumlah responden

k = merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel

b. Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Riyadi (2000) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,5 (Nunnally, 1967 : 120). Langkah-langkah melakukan uji reliabilitas terhadap suatu konstruk variabel sama dengan melakukan uji validitas. Output SPSS untuk uji reliabilitas akan dihasilkan secara bersama-sama dengan hasil uji validitas.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian: (a) normalitas, (b) multikolinearitas, dan (c) heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi suatu data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yaitu distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell shaped*). Data yang dikatakan baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal.

Pedoman pengambilan keputusan dengan uji Kolmogorov-Smirnov tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal dapat dilihat dari :

- a. Nilai sig. atau signifikan atau probabilitas $< 0,05$, maka distribusi data adalah tidak normal
- b. Nilai sig. atau signifikan atau probabilitas $> 0,05$, maka distribusi data adalah normal

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kita sebut variabel-variabel bebas ini tidak ortogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat sama dengan nol. Jika terjadi korelasi sempurna diantara sesama variabel bebas, maka konsekuensinya adalah :

1. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir
2. Nilai *standart error* setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Ada dua cara yang dapat dilakukan jika terjadi multikolinieritas, yaitu :

1. Mengeluarkan salah satu variabel, misalnya variabel independen A dan B saling berkorelasi dengan kuat, maka bisa dipilih A atau B yang dikeluarkan dari model regresi
2. Menggunakan metode lanjut seperti Regresi Bayesian atau Regresi Ridge

Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara variabel bebas (*independent variabel*). Jika nilai korelasi antara variabel bebas tersebut lebih besar dari 0,7 (Nunnally, 1967), maka dapat dikatakan bahwa adanya gejala multikolinieritas. Disamping dengan melakukan uji korelasi tersebut, pengujian ini juga dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari model penelitian, jika nilai VIF diatas 2 (Hair, 2003), maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi gejala multikolinieritas dalam model penelitian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* di sekitar nilai X_1 , X_2 , X_3 , dan Y . Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang digunakan hanya terbatas pada ketiga uji di atas, sedangkan uji autokorelasi tidak digunakan. Hal ini dikarenakan uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ atau sebelumnya muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lainnya, maka uji autokorelasi ini sering ditemukan

pada *time series*, sedangkan data yang dikumpulkan oleh penulis ada data *crosssection*, maka masalah autokorelasi relatif tidak terjadi.

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Menurut Kuncoro (2003 : 216), sebagai alat statistik, regresi bermanfaat dalam menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut, (1)seberapa jauh variasi perubahan variabel dependen mampu dijelaskan oleh seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model; (2) manakah di antara variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen; (3) apakah dengan dimasukkannya tambahan satu variabel independen dapat memperbaiki prediksi terhadap variabel dependen; (4) apakah prediksi terhadap variabel dependen dari sejumlah variabel independen lebih baik dibandingkan dengan kombinasi variabel independen yang lain; dan (5) apakah penambahan sampel/observasi akan meningkatkan daya prediksi model.

Pada penelitian ini pendekatan analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis linear berganda. Metode analisis linear berganda digunakan untuk melihat secara langsung pengaruh beberapa variabel dependen tersebut. Model analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Transparansi pengelolaan keuangan daerah (variabel dependen)

X1 = Penyajian laporan keuangan daerah (variabel independen)

X2 = Aksesibilitas laporan keuangan daerah (variabel independen)

a = Konstanta

b_1 = koefisien regresi X_1 (arah garis regresi yang menyatakan perubahan nilai Y , akibat perubahan X_1)

b_2 = koefisien regresi X_2 (arah garis regresi yang menyatakan perubahan nilai Y , akibat perubahan X_2)

e = Kesalahan residual (*error term*)

a. Uji Parsial (Uji-t)

Uji statistik t dikenal juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah :

$H_0 : b_1 = 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a : b_1 \neq 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen

Kriteria pengambilan keputusan :

Apabila probabilitas $< \alpha = 5\%$, maka H_a diterima

Apabila probabilitas $> \alpha = 5\%$, maka H_a ditolak

b. Uji Simultan (Uji-F)

Uji-F digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut :

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$, artinya secara bersama-sama (simultan) variabel independen tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, artinya secara bersama-sama (simultan) variabel independen terdapat pengaruh terhadap variabel dependen, dengan kriteria :

H_0 diterima, apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_a diterima, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan analisa regresi berganda. Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F atau yang biasa disebut dengan *Analysis of Variance (ANOVA)*. Pengujian ANOVA atau Uji F bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat tingkat signifikansi atau dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada tabel ANOVA $< \alpha 0,05$, maka H_0 ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada tabel ANOVA $> \alpha 0,05$, maka H_0 diterima (tidak berpengaruh).

Pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($\alpha 0,05$) maka H_0 ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($\alpha 0,05$) maka H_0 diterima (tidak berpengaruh). Adapun F_{tabel} dicari dengan memperhatikan tingkat kepercayaan (α) dan derajat bebas (*degree of freedom*).

c. Adjusted R²

Pengujian *adjusted R²* digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. *adjusted R²* berkisar antara nol sampai dengan 1 ($0 \leq \text{adjusted } R^2 \leq 1$). Hal ini berarti apabila *adjusted R²* = 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila *adjusted R²* semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen dan bila *adjusted R2* semakin kecil mendekati 0, maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.4 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan Sumatera Utara.

Tabel 3.6

Jadwal penelitian

Tahapan Penelitian	Maret	April	Juni	Agustus	September
Penyelesaian proposal					
Pencarian data awal					
Pengajuan proposal					
Penyerahan proposal pada dosen pembimbing Bimbingan dan perbaikan proposal					
Seminar proposal					
Pengumpulan data					
Pengolahan data					
Bimbingan skripsi					
Penyelesaian skripsi					

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Medan

Pada zaman dahulu kota Medan dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera. Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan-Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer. Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke sungai Wampu di Langkat sedangkan kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai tersebut.

Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah cokelat dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissink tahun 1990 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun 1910 bahwa disamping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah liat yang spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda di tempat yang bernama Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata yang berkualitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Deli Klei. Mengenai curah hujan di Tanah Deli digolongkan dua

macam yakni : Maksima Utama dan Maksima Tambahan. Maksima Utama terjadi pada bulan- bulan Oktober s/d bulan Desember sedang Maksima Tambahan antara bulan Januari s/d September. Secara rinci curah hujan di Medan rata-rata 2000 pertahun dengan intensitas rata-rata 4,4 mm/jam. Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disana sini terutama di muara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.

4.1.2 Letak Geografis

Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas kota Medan menjadi 1.130 Ha, meliputi empat kecamatan dengan 59 kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1973 kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 Kelurahan. Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, kota Medan melakukan pemekaran kelurahan menjadi 144 kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan surat

Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefitipan 7 kelurahan di kotamadya daerah tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang pembentukan beberapa kecamatan di kotamadya daerah tingkat II Medan, secara administrasi kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan. Berdasarkan perkembangan administrasi ini kota Medan kemudian tumbuh secara geografis, demografis dan sosial ekonomis.

4.2. Analisis data

Penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 48 orang, dimana peneliti telah membagikan empat puluh delapan (48) buah kuesioner kepada responden di Kantor keungan daerah di Kota Medan. Dimana dari angket yang disebar seluruhnya kembali ke penulis, artinya yang akan penulis teliti adalah total 48 sampel yang akan diuji oleh peneliti.

1.2.1 Identitas Respoden

Dibawah ini akan dijelaskan identitias responden dari angket yang disebar, dimana pada angket yang disebar identitas responden yang ditanyakan adalah nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, jabatan dan pendidikan terakhir, karena menyangkut privasi responden, maka dalam penelitian ini yang ditampilkan oleh penulis adalah Umur, Jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan terakhir. Persentase dari masing masing jawaban respoden akan di jelaskan pada tabel dibawah ini.

a. Usia

Tabel 4.1 usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 25 sampai 35 tahun	18	37.5	37.5	37.5
36 sampai 45 tahun	17	35.4	35.4	72.9
diatas 45 tahun	13	27.1	27.1	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Dari tabel 4.1 diatas terlihat persentase usia responden dimana responden yang berusia diantara 25 sampai 35 tahun berjumlah 18 orang (37,5%), kemudian responden yang berusia diantara 36 sampai 45 tahun berjumlah 17 orang (35,4%), dan yang berusia diatas 45 tahun berjumlah 13 orang (27,1%),

b. Jenis kelamin

Tabel 4.2 jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki laki	26	54.2	54.2	54.2
Perempuan	22	45.8	45.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Dari tabel diatas terlihat persentase jenis kelamin responden, dimana yang berjenis kelamin laki laki berjumlah 26 orang (54,2%), dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 22 orang (45,8%).

c. Pekerjaan

Tabel 4.3 pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PNS	45	93.8	93.8	93.8
lainnya	3	6.2	6.2	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Dari tabel diatas terlihat persentase pekerjaan responden dimana , yang memiliki pekerjaan sebagai PNS berjumlah 45 orang (93.8%), dan yang memiliki pekerjaan lainnya berjumlah 3 orang (6,2%).

d. Pendidikan

Tabel 4.4 pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	16	33.3	33.3	33.3
D3	4	8.3	8.3	41.7
S1-S2	28	58.3	58.3	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Dari tabel diatas terlihat persentase pendidikan responden dimana yang berpendidikan SMA berjumlah 16 orang (33,3%) yang berpendidikan D3 berjumlah 4 orang (8,%), dan yang berpendidikan S1-S2 berjumlah 28 orang (58,3%).

1.2.2 Persentase Jawaban Responden

Dibawah ini akan dijabarkan persentase dari jawaban responden yang di sebar, dalam peneltian ini terdapat 7 item pernyataan untuk variabel X1, 3 item pernyataan untuk varibel X2, dan 5 item pernyataan untuk variabel Y, detail untuk responden bisa di lihat di tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 persentase jawaban variabel X1 Kualitas Informasi Keuangan

No item	STS		TS		RR		S		SS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	-	-	2	4,2	1	2,1	13	27,1	32	66,7
2	-	-	2	4,2	2	4,2	12	25	32	66,7
3	-	-	-	-	1	2,1	31	64,6	16	33,3
4	-	-	1	2,1	1	2,1	29	60,4	17	35,4

5	1	2,1	-	-	3	6,2	34	70,8	10	20,8
6	-	-	-	-	1	2,1	19	39,6	28	58,3
7	-	-	-	-	1	2,1	33	68,4	14	29,2

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa :

1. Pada pernyataan “ Laporan keuangan Pemko Medan memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu ” sebanyak 2 orang (4,2%) menjawab tidak setuju, 1 orang (2,1%), menjawab ragu ragu, 13 orang (27,1%) menjawab setuju, dan 32 orang (66,7%) menjawab sangat setuju.
2. Pada pernyataan “ Laporan Keuangan Pemko Medan dapat membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.” Sebanyak 2 orang (4,2%) menjawab tidak setuju, 2 orang (4,2%) menjawab ragu ragu, 12 orang (25%) menjawab setuju, dan 32orang (66,7%) menjawab sangat setuju.
3. Pada pernyataan “ Laporan Keuangan Pemko Medan selalu disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. “ sebanyak 1orang (2,1%) menjawab ragu ragu, 31 orang (64,6%) menjawab setuju, dan 16 orang (33,3%) menjawab sangat setuju.
4. Pada pernyataan “Laporan Keuangan Pemko Medan disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.” Sebanyak 1 orang (2,1%) menjawab tidak setuju, 1 orang (2,1%) menjawab ragu ragu, 29 orang (60,4%) menjawab setuju, dan 17 orang (35,4%) menjawab sangat setuju.

5. Pada pernyataan “Laporan Keuangan Pemko Medan menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.” Sebanyak 1 orang (2,1%) menjawab sangat tidak setuju, 3 orang (6,2%) menjawab ragu ragu, 34 orang (70,8%) menjawab setuju dan, 10 orang (20.8%) menjawab sangat setuju.
6. Pada pernyataan “ Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemko Medan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Sebanyak 1 orang (2,1%) menjawab ragu ragu, 19 orang (39,6%) menjawab setuju, dan 28 orang (58,3%) menjawab sangat setuju.
7. Pada pernyataan “ Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemko Medan dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pengguna. Sebanyak 1 orang (2,1%) menjawab ragu-ragu, 33 orang (68,4 %) menjawab setuju, dan 14 orang (29,2 %) menjawab sangat setuju.

Tabel 4.6 persentase jawaban variabel X2 Aksesibilitas Laporan Keuangan

No item	STS		TS		RR		S		SS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	-	-	1	2,1	1	2,1	29	60,4	17	35,4
2	-	-	1	2,1	-	-	33	68,8	14	29,2
3	-	-	-	-	1	2,1	31	64,6	16	33,3

1. Pada pernyataan “Laporan Keuangan Pemko Medan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa. Sebanyak 1 orang (2,1%) menjawab tidak setuju, 1 orang (2,1%) menjawab ragu ragu, 29 orang (60,4%) menjawab setuju, dan 17orang (35,4%) menjawab sangat setuju.
2. Pada pernyataan “Pemerintah kota Medan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan.” Sebanyak 1 orang (2,1%) menjawab tidak setuju, 33 orang (68,8%) menjawab setuju, dan 14 orang (29,2%) menjawab sangat.
3. Pada pernyataan “ Masyarakat dapat mengakses Laporan Keuangan Pemko Medan melalui internet.” Sebanyak 1 orang (2,1%) menjawab ragu ragu ,31 orang (64,6%) menjawab setuju, dan 16 orang (33,3%) menjawab sangat setuju.

Tabel 4.7 persentase jawaban variabel Y Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

No item	STS		TS		RR		S		SS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	-	-	2	4,2	-	-	19	39,6	27	56,2
2	-	-	-	-	-	-	32	66,7	16	33,3
3	-	-			2	4,2	29	60,4	17	35,4
4	-	-	1	2,1	2	4,2	11	22,9	11	22,9
5	10	20,8	30	62,5	6	12,5	-	-	2	4,2

1. Pada pernyataan “Pengelolaan Keuangan Pemko Medan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai “ sebanyak 2 orang (4,2%) menjawab tidak setuju, 19 orang (39,6%) menjawab setuju,27 orang (56,2%) menjawab sangat setuju.

2. Pada pernyataan “Penyebarluasan laporan Keuangan Pemko Medan telah disampaikan melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal. “ sebanyak 32 orang (66,7%) menjawab setuju, dan 16 orang (33,3%) menjawab sangat setuju
3. Pada pernyataan “Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemko Medan.” Sebanyak 2 orang (4,2%) menjawab ragu ragu, 29 orang (60,4%) menjawab setuju, dan 17 orang (35,4%) menjawab sangat setuju.
4. Pada pernyataan “Ada ketersediaan system informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh Pemko Medan.” Sebanyak 1 orang (2,1%) menjawab tidak setuju, 2 orang (4,2%) menjawab ragu ragu, dan 11 orang (22,9%) menjawab setuju, serta, 11 orang (22,9%) menjawab sangat setuju.
2. Pada pernyataan “Penyampaian Laporan Keuangan Pemko Medan telah melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.” Sebanyak 10 orang (20,8%) menjawab sangat tidak setuju, 30 orang (62,5%) menjawab tidak setuju, 6 orang (12,5%) menjawab ragu ragu dan 2 orang (4,2%) menjawab sangat setuju.

4.2.3 Analisis Statistik

a. Uji validitas dan reliabilitas.

Untuk menguji apakah instrumen yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya maka perlu diuji Validitas dan Reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji Validitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kevalidan atau kebenaran dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan/ Pernyataan, maka digunakan teknik korelasi *product moment* (Sugiyono, 2010). Pengujian tiap butir instrument bebas dengan cara mengkorelasikan tiap butir pertanyaan tersebut, syarat minimum untuk mempengaruhi syarat apakah setiap valid atau tidak valid dengan membandingkan $r\text{-tabel} = 0,278$, jadi jika koefisien korelasi (r_{xy}) $> 0,278$ maka butir pernyataan dinyatakan valid, sebaliknya jika $r_{xy} < 0,278$ maka dinyatakan tidak valid. Berdasarkan data yang telah terkumpul, maka terdapat 7 koefisien korelasi untuk variabel (X1), 3 koefisien korelasi untuk variabel (X2), 5 koefisien korelasi untuk variabel (Y) hasil analisis item bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8 Hasil Validitas Item Pertanyaan X1 Kualitas Informasi Keuangan

No. Butir	r-hitung	r-tabel	Status
1	0,846	0,278	Valid
2	0,829	0,278	Valid
3	0,402	0,278	Valid
4	0,715	0,278	Valid
5	0,752	0,278	Valid
6	0,400	0,278	Valid
7	0,435	0,278	Valid

Dari tabel diatas terlihat nilai-nilai untuk uji validitas variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah, dimana semua instrument pernyataan bernilai diatas

0.278, artinya semua instrument yang disebar valid untuk diberikan kepada responden.

Tabel 4.9 Hasil Validitas Item Pertanyaan X2 Aksesibilitas Laporan Keuangan

No. Butir	r-hitung	r-tabel	Status
1	0,909	0,278	Valid
2	0,871	0,278	Valid
3	0,697	0,278	Valid

Dari tabel diatas terlihat nilai nilai untuk uji validitas variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan dimana semua instrument pernyataan bernilai diatas 0.278, artinya semua instrument yang disebar valid untuk diberikan kepada responden.

Tabel 4.10 Hasil Validitas Item Pertanyaan Y Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

No. Butir	r-hitung	r-tabel	Status
1	0,522	0,278	Valid
2	0,394	0,278	Valid
3	0,664	0,278	Valid
4	0,663	0,278	Valid
5	0,322	0,278	Valid

Dari tabel diatas terlihat nilai nilai untuk uji validitas variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dimana semua instrument pernyataan bernilai diatas 0.278, artinya semua instrument yang disebar valid untuk diberikan kepada responden.

2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan adanya kesempatan data yang didapat dari waktu ke waktu. Reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi instrument kuesioner dalam penggunaannya. Menurut Juliandi (2014.80) menyatakan bahwa “Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat apakah instrumen yang handal dan dapat dipercaya maka hasil penelitian juga dapat memiliki tingkat keterpercayaan yang tinggi”. Menurut Arikunto dalam Juliandi (2014.82) menyatakan bahwa pengujian realibilitas dengan menggunakan teknik *Cronbach Alpha*.

Tabel 4.11 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.834	15

Kriteria pengujiannya :

- a. Jika nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,60$ maka reliabilitas cukup baik
- b. Jika nilai *Cronbach Alpha* $\leq 0,60$ maka reliabilitas tidak cukup baik

Pada 15 pernyataan dengan tingkat signifikansi 5% di ketahui bahwa koefisien apha (*Cronbach's Alpha*) adalah sebesar 0.834. Ini berarti $0.834 > 0,60$ sehingga dapat dinyatakan bahwa kuesioner tersebut telah reliabel dan dapat disebarkan kepada responden untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

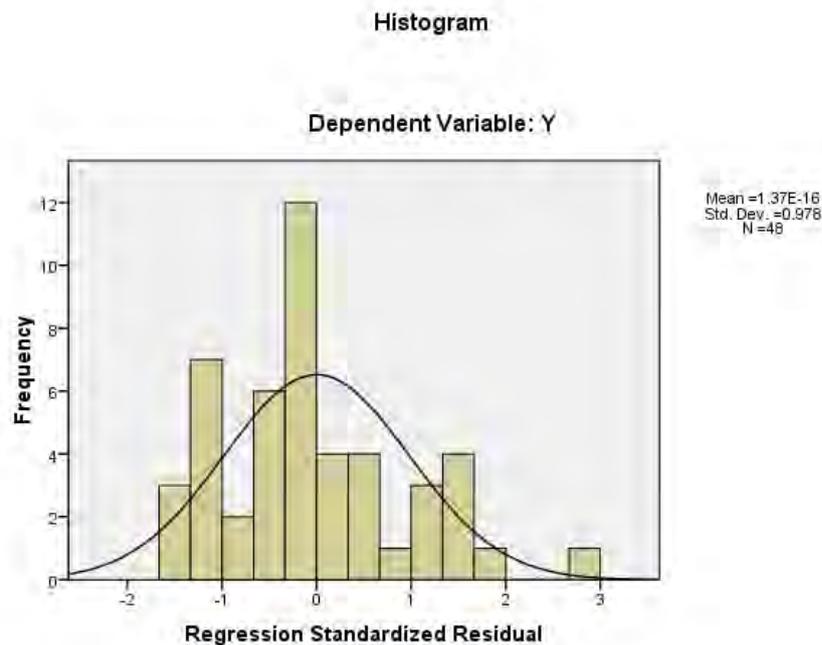
Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan analisis regresi, agar dapat diperkirakan yang tidak bias dan efesiensi maka dilakukan pengujian

asumsi klasik yang harus dipenuhi, yang pertama adalah uji normalitas. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan *pendekatan grafik* dan pendekatan *Kolmogrov-Smirnov*.

1. Pendekatan grafik

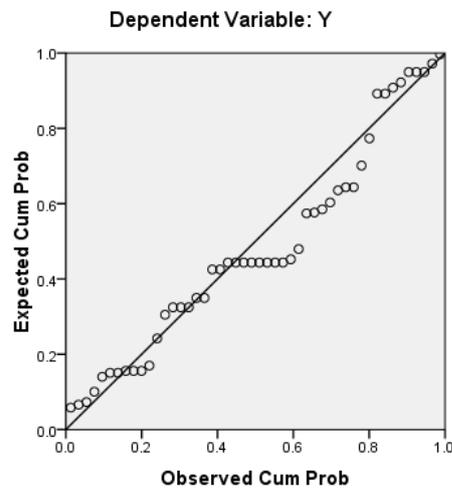
Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik histogram dan grafik normal plot yang membandingkan antara dua observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal

Gambar 4.1 histogram normalitas



Sumber: data diolah spss 2018
Gambar 4.1 p-plot normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa hubungan dari variabel Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah adalah berdistribusi normal, hal ini ditunjukkan oleh gambar histogram yang tidak terlihat menceng ke kiri maupun ke kanan. Sedangkan pada Gambar 4.2 data berdistribusi normal dapat dilihat pada *scatterplot*, terlihat titik-titik yang mengikuti garis diagonal.

2 . Uji kolmogorov smirmov

Uji normalitas dengan grafik bisa saja terlihat berdistribusi normal, padahal secara statistik tidak berdistribusi normal. Berikut ini pengujian normalitas yang berdasarkan dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) untuk memastikan apakah data benar berdistribusi normal.

Tabel 4.12 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.09729520
Most Extreme Differences	Absolute	.153
	Positive	.153
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		1.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.211

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0.211, dan diatas nilai signifikan (0.05), dengan kata lain variabel residual berdistribusi normal. Nilai *Kolmogrov-Smirnov Z* yakni 1.0.60 lebih kecil dari 1,97. berarti tidak ada perbedaan antara distribusi teoritik dan distribusi empirik atau dengan kata lain data dikatakan normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

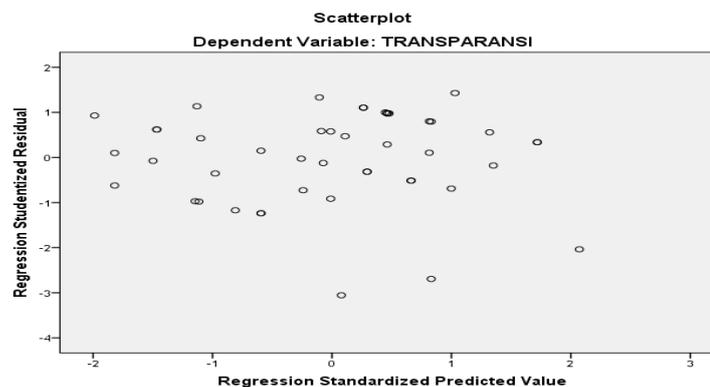
Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu:

1. Metode grafik

Dasar analisis adalah tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas, sedangkan jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.3 Grafik *ScatterPlot* Uji heteroskedastisitas



Berdasarkan Gambar 4.3 dapat terlihat dari grafik *ScatterPlot* yang disajikan, terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi transparansi laporan keuangan daerah, berdasarkan masukan variabel independennya.

2. Uji Glejser

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya, jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0.05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.13 Uji Glejser Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.836	1.164		.718	.476
Penyajian data keuangan	-.020	.045	-.080	.431	.669
Aksesibilitas Pengolahan keuangan daerah	.047	.093	.095	.510	.613

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan Tabel 4.13 terlihat jelas menunjukkan tidak satupun variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen absolut Ut (asbUt). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%, jadi disimpulkan model regresi tidak memengaruhi heteroskedastisitas.

3. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen.

Tabel 4.14 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.462	1.843			
kualitas informasi keungan	.274	.072	.493	.635	1.575

aksesibilitas laporan keuangan	.351	.147	.308	.635	1.575
--------------------------------	------	------	------	------	-------

a. Dependent Variable:
transparansi keuangan daerah

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai VIF dari variabel Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah lebih kecil atau dibawah 5 ($VIF < 5$), ini berarti tidak terkena multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Nilai *Tolerance* dari variabel Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah lebih besar dari 0.1 ($Tolerance > 0.1$), ini berarti tidak terdapat multikolienaritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Hipotesis

1. Uji regresi linear berganda

Hasil regresi linear berganda untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan yang ditunjukkan pada Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15 uji regresi linear berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.462	1.843		3.505	.001
kualitas informasi keuangan	.274	.072	.493	3.809	.000
aksesibilitas laporan keuangan	.351	.147	.308	2.384	.021

a. Dependent Variable: transparansi laporan keuangan daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji Coefficients. Pada tabel *coefficients* yang dibaca adalah nilai dalam kolom B pada baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen. Berdasarkan Tabel 4.15 di atas maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = 6.462 + 0.274X_1 + 0.351X_2 + e$$

$$\text{Transparansi} = 6.462 + 0.274 \text{ Penyajian} + 0.351 \text{ Aksesibilitas} + e$$

Dari persamaan regresi tersebut di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 6,462 menyatakan bahwa jika nilai Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah adalah nol atau konstan, maka nilai Transparansi Laporan Keuangan Daerah adalah sebesar 6,462.
- b. Koefisien Regresi Kualitas Informasi Keuangan sebesar 0.274 menunjukkan bahwa apabila Kualitas Informasi Keuangan ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka Transparansi Laporan Keuangan akan meningkat sebesar 0.274 satuan.
- c. Koefisien Regresi Aksesibilitas Laporan Keuangan sebesar 0.351 menunjukkan bahwa apabila Aksesibilitas Laporan keuangan ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka Transparansi akan meningkat sebesar 0.351 satuan.

2. Uji Signifikansi secara parsial (Uji T)

Pengujian secara parsial ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel

dependen. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui variabel independen mana yang dominan.

Tabel 4.16 uji Parsial Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.462	1.843		3.505	.001
kualitas informasi keuangan	.274	.072	.493	3.809	.000
aksesibilitas laporan keuangan	.351	.147	.308	2.384	.021

a. Dependent Variable: transparansi laporan keuangan daerah

Berdasarkan Tabel 4.16 Dapat dilihat bahwa:

a. Variabel Kualitas Informasi Keuangan (X1)

Nilai t_{hitung} variabel Kualitas Informasi Keuangan adalah 3,809 dan nilai t_{tabel} 1.679 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,809 > 1.679$) dan nilai signifikan ($0.000 < 0.05$).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengaruh variabel Kualitas Informasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah. Artinya apabila variabel Kualitas Informasi Keuangan Daerah ditingkatkan, maka Transparansi Laporan Keuangan akan meningkat sebesar 0.274 satuan.

b. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)

Nilai t_{hitung} variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan adalah 2,384 dan nilai t_{tabel} adalah 1.679 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.384 > 1.679$) dan nilai signifikan ($0.021 < 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengaruh variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah. Artinya apabila

variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah ditingkatkan, maka Transparansi Laporan Keuangan akan meningkat sebesar 0.351 satuan.

3. Uji secara simultan (uji F)

Uji F (uji serentak) dilakukan untuk melihat secara bersama-sama pengaruh atau hubungan positif dan signifikan variabel dependen (X Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap variabel independen (Y) berupa Transparansi Laporan Keuangan Daerah (Y) pada Pemerintah Kota Medan. Model hipotesis yang digunakan dalam Uji F ini adalah sebagai berikut:
 $H_0 : b_1 = b_2 = 0$, artinya secara serentak tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel independen (X_1, X_2) berupa Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah.

$H_0 : b_1 \neq b_2 \neq 0$, Artinya secara serentak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas (X_1, X_2) berupa Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap variabel independen (Y) berupa Transparansi Laporan Keuangan Daerah (Y). Untuk menentukan nilai F, maka diperlukan adanya derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut, dengan rumus sebagai berikut:

$$df(\text{pembilang}) = k - 1$$

$$df(\text{penyebut}) = n - k$$

Keterangan:

n = jumlah sampel penelitian

k = jumlah variabel bebas dan terikat

Pada penelitian ini diketahui jumlah sampel (n) adalah 48 dan jumlah keseluruhan variabel (k) adalah 3, sehingga diperoleh:

$$1) df(\text{pembilang}) = k - 1 \quad df(\text{pembilang}) = 3 - 1 = 2$$

$$2) \text{ df (penyebut) } = n - k \quad \text{df (penyebut) } = 47 - 3 = 44$$

Nilai F_{hitung} akan diperoleh dengan menggunakan bantuan *software SPSS 20,0 for Windows*, kemudian akan dibandingkan dengan nilai $F = 5\% = 3.21$ dengan kriteria uji sebagai berikut:

H_0 diterima bila $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak bila $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ pada $\alpha = 5\%$

Tabel 4.17 hasil uji simultan ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	61.722	2	30.861	24.540	.000 ^a
Residual	56.591	45	1.258		
Total	118.313	47			

a. Predictors: (Constant), aksesibilitas laporan keuangan, kualitas informasi keuangan

b. Dependent Variable: transparansi laporan keuangan daerah

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat dilihat hasil perolehan F_{hitung} yakni sebesar 24,540 dengan tingkat signifikansi = 0.000. Sedangkan F_{tabel} sampel 48 dengan variabel yang diteliti berjumlah 2 variabel independen dan 1 variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) adalah 3.21. Oleh karena pada kedua perhitungan yaitu $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($24,450 > 3,21$) dan tingkat signifikansinya $0.000 < 0.05$, menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah secara serempak atau simultan adalah berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah.

4. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Pengujian koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Jika R^2 semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) adalah besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan demikian sebaliknya.

Tabel 4.18 pengujian koefisien determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.722 ^a	.522	.500	1.12141

a. Predictors: (Constant), aksesibilitas laporan keuangan, kualitas informasi keuangan

b. Dependent Variable: transparansi laporan keuangan daerah

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa:

- $R=0.722$ berarti hubungan variabel Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap variabel dependen Transparansi Laporan Keuangan (Y) sebesar 72,2%, yang berarti hubungannya cukup erat.
- $R Square$ sebesar 0.522 berarti 52,2% variabel Transparansi Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh variabel Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 48,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini
- Standard Error of Estimate* (standar deviasi) artinya menilai ukuran variasi dari nilai yang diprediksi. Dalam penelitian ini standar deviasinya adalah

1.12141, yang mana semakin kecil standar deviasi berarti model semakin baik.

4.2.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya diketahui bahwa secara simultan kualitas informasi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan kota Medan. Secara parsial, variabel aksesibilitas merupakan variabel yang dominan dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinan diketahui bahwa variabel kualitas informasi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah menjelaskan 52,2% dari transparansi pengelolaan keuangan daerah, sedangkan 48,8% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

1. Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Medan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyana (2006) yang meneliti Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa penyajian berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang berbeda ini dikarenakan perbedaan lokasi penelitian dan juga waktu penelitian. Berdasarkan deskripsi jawaban responden pada butir pernyataan kelima diketahui bahwa terdapat 8,3%

responden yang menyatakan bahwa kualitas informasi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Medan belum sepenuhnya jujur. Selain daripada itu, sebagian besar responden sudah menyetujui dengan pernyataan yang ditanyakan, yang mana mengungkapkan bahwa kualitas informasi keuangan daerah sudah cukup baik, hanya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kedepannya, seperti kejujuran dan kelengkapan laporan keuangan daerah.

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila variabel aksesibilitas ditingkatkan, maka transparansi akan meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani (2013) yang meneliti tentang pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan keuangan terhadap Akuntabilitas / Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemko Bandung, yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan deskripsi responden ada beberapa responden yang tidak setuju bahwa laporan keuangan mudah diakses, baik secara *online* maupun melalui media massa. Hal ini tentu saja akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan kota Medan. Apabila hal ini diperbaiki dan ditingkatkan, tentu saja maka kepercayaan masyarakat akan terbangun dan transparansi akan tercapai dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara simultan, kualitas informasi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Medan.
2. Secara parsial, aksesibilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemerintah memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses laporan keuangan, maka akan meningkatkan transparansi laporan keuangan.
3. Kualitas informasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas informasi keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur maka akan meningkatkan transparansi laporan keuangan.
4. Berdasarkan nilai *R Square* diperoleh angka sebesar 0.522 yang berarti bahwa 52,2% transparansi dipengaruhi oleh kualitas informasi dan aksesibilitas,

sedangkan 48,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti menerapkan metode survey melalui kuesioner, sehingga peneliti tidak melakukan wawancara atau terlibat secara langsung dalam aktivitas satuan kerja perangkat daerah pemerintahan kota Medan sehingga tidak dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya dan kesimpulan yang diambil hanya didasarkan pada data yang terkumpul melalui penggunaan instrumen tertulis.
2. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, data, dan dana dalam melakukan penelitian sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk menjadikan seluruh SKPD yang ada di Pemerintahan Kota Medan untuk menjadi sampel penelitian.
3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 52,2% transparansi pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh kualitas informasi dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, sedangkan 48,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Karena adanya keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, maka masih banyak variabel lain yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Hasil yang telah diperoleh melalui penelitian pada pemerintahan kota Medan tidak dapat disetarakan dengan pemerintah kota lainnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan perbedaan jawaban dari responden pada pemerintahan kota lainnya di Indonesia.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintahan kota Medan sebaiknya memuat laporan keuangan ke dalam media cetak..Aksesibilitas laporan keuangan yang baik dan tersedia melalui berbagai media, tidak hanya dari media massa saja (internet).
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat lebih menyempurnakan penelitian ini dengan menggunakan variabel- variabel lain yang masih mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah misalnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Efektivitas Laporan Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D, 1998. *Teknik Penyusunan Skala Pengukur*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, edisi 4, cetakan keempat. Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Hanim, Nasution, 2009. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa)”, *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Diamond, 2006. “Pengungkapan atas informasi merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas”
- Shende dan Bennet, 2004. “Demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan internet, dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat”.
- Koester, 2002. “Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya”. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2006. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, volume 2 Nomor 1, Universitas Gajah Mada, hal 1-17.
- Mulyana, Budi, 2006. “Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, volume 2, Nomor 1, Universitas Gajah Mada, hal 56.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- , Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- , Undang- Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 1 ayat 2

Saufi, Iqbal Nasution, 2010. “Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara ”, *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Henley et al, 1990. “Laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya”

Soesastro, Hadi.dkk. 2005. *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir:Proses Pemulihan Ekonomi*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Sugiono, 2006. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan kedelapan, CV Alfabet Bandung.

KK, SAP, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.

Andrianto, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar, Edisi Pertama*, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Riyadi, 2000. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Penerbit Brama Ardian, Medan.

Umar, Husein, 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

LAMPIRAN 1 KUESIONER

Kuesioner Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan

Kepada Yth :

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari agar sudi kiranya memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian skripsi saya. Dan saya menjamin serta bertanggung jawab atas informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan adalah untuk kepentingan akademis semata.

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan, saya ucapkan terima kasih.

(Siti Kemala Sari Tambunan)

Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk masing-masing pertanyaan yang tersedia pada lembaran daftar kuesioner. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari cukup memberikan tanda centang pada kolom kode jawaban yang tersedia yaitu : SS, S, RR, TS, dan STS. Adapun skor untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut :

Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 Tidak Setuju (TS)

Skor 3 Ragu-Ragu(RR)

Skor 4 Setuju (S)

Skor 5 Sangat Setuju (SS)

Identitas Responden

Nama : _____

Umur : _____

Jenis Kelamin : _____

Pekerjaan : _____

Jabatan : _____

Pendidikan Terakhir : _____

(*) Boleh tidak diisi

NO.	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	SS	S	RR	TS	STS
1.	Laporan keuangan Pemko Medan memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.					
2.	Laporan Keuangan Pemko Medan dapat membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.					
3.	Laporan Keuangan Pemko Medan selalu disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.					
4.	Laporan Keuangan Pemko Medan disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.					
5.	Laporan Keuangan Pemko Medan menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.					
6.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemko Medan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.					
7.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemko Medan dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pengguna.					
No.	Aksesibilitas Laporan Keuangan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Laporan Keuangan Pemko Medan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.					
2.	Pemerintah kota Medan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan.					
3.	Masyarakat dapat mengakses Laporan Keuangan Pemko Medan melalui internet.					
No.	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	SS	S	RR	TS	STS

1.	Pengelolaan Keuangan Pemko Medan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai					
2.	Penyebarluasan laporan Keuangan Pemko Medan telah disampaikan melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.					
3.	Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemko Medan.					
4.	Ada ketersediaan system informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh Pemko Medan.					
5.	Penyampaian Laporan Keuangan Pemko Medan telah melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.					

LAMPIRAN 2
TABULASI ANGKET
IDENTITAS RESPONDEN

No	Usia	JK	PK	PDDT
1	3	1	1	3
2	1	2	1	3
3	3	2	1	1
4	3	2	1	1
5	1	2	3	3
6	2	1	1	2
7	1	1	1	3
8	2	1	1	3
9	1	2	1	2
10	2	1	1	3
11	2	1	1	3
12	3	1	1	3
13	3	1	1	3
14	2	2	1	3
15	1	2	3	1
16	1	2	3	1
17	3	1	1	1
18	2	1	1	1
19	1	1	1	3
20	1	1	1	3

21	1	1	1	3
22	2	2	1	3
23	3	1	1	1
24	1	2	1	3
25	1	1	1	3
26	2	2	1	3
27	2	2	1	1
28	1	1	1	3
29	2	1	1	2
30	1	2	1	3
31	2	1	1	3
32	2	2	1	3
33	3	2	1	1
34	3	2	1	1
35	3	2	1	1
36	2	2	1	1
37	2	1	1	1
38	2	2	1	3
39	3	1	1	3
40	1	1	1	3
41	1	2	1	3
42	1	1	1	2
43	3	2	1	1
44	3	1	1	1
45	2	1	1	3
46	1	1	1	1
47	1	2	1	3
48	2	1	1	3

PERSENTASE JAWABAN

no	X1							total x1
1	5	5	4	4	4	5	4	31
2	5	5	4	4	4	5	4	31
3	2	2	3	3	3	4	4	21
4	5	5	4	4	4	5	4	31
5	4	4	4	4	4	5	4	29
6	5	5	4	4	4	5	4	31
7	5	5	4	4	5	5	4	32
8	5	5	4	4	4	5	4	31
9	3	3	4	4	4	4	4	26
10	4	4	4	5	5	4	5	31
11	5	4	5	5	4	5	4	32
12	5	5	4	4	4	5	4	31

13	5	5	4	4	4	5	4	31
14	5	5	4	5	4	4	5	32
15	5	5	5	5	4	4	5	33
16	4	4	5	5	5	5	4	32
17	5	5	4	4	4	5	4	31
18	2	2	4	2	1	3	3	17
19	5	5	4	4	4	5	4	31
20	4	4	5	5	4	5	4	31
21	5	5	5	4	4	4	4	31
22	4	4	5	5	4	5	4	31
23	5	5	4	4	4	5	4	31
24	4	4	5	4	4	5	4	30
25	4	3	4	5	4	4	5	29
26	5	5	5	5	4	5	5	34
27	5	5	4	5	5	4	5	33
28	5	5	4	4	4	5	4	31
29	4	4	4	4	4	4	4	28
30	5	5	5	5	4	4	5	33
31	4	4	5	4	3	4	5	29
32	4	4	5	4	3	4	5	29
33	4	5	5	5	4	5	4	32
34	5	5	4	4	4	5	4	31
35	5	5	4	4	4	5	4	31
36	4	4	5	5	5	4	5	32
37	5	5	4	4	4	5	4	31
38	4	4	4	5	4	5	4	30
39	5	5	4	4	5	4	4	31
40	5	5	5	5	4	5	4	33
41	5	5	4	4	4	5	4	31
42	5	5	4	4	4	5	4	31
43	5	5	4	4	5	4	5	32
44	5	5	4	4	4	5	4	31
45	5	5	5	5	5	4	4	33
46	5	5	4	4	5	4	5	32
47	5	5	4	5	4	4	5	32
48	5	5	5	4	5	4	5	33

	X2		totalx2
4	4	4	12
4	4	4	12
3	4	4	11
4	4	4	12
4	4	4	12

4	4	4	12
4	4	4	12
4	4	4	12
4	4	4	12
4	4	5	13
5	4	5	14
4	4	4	12
4	4	4	12
5	5	4	14
5	5	4	14
5	4	4	13
4	4	4	12
2	2	3	7
5	5	5	15
5	5	5	15
4	5	4	13
4	4	4	12
4	4	4	12
5	5	4	14
5	4	4	13
4	4	3	11
5	5	5	15
5	5	5	15
4	4	5	13
5	5	4	14
4	4	4	12
4	4	4	12
5	5	4	14
4	4	4	12
4	4	5	13
5	4	5	14
4	4	4	12
5	5	4	14
4	4	4	12
5	4	4	13
5	5	4	14
4	4	4	12
4	4	4	12
4	5	4	13
4	4	4	12
4	4	4	12
4	4	5	13
5	5	5	15

Y					total Y
5	4	4	4	2	19
5	4	4	4	3	20
2	4	3	3	3	15
5	4	4	4	1	18
4	4	4	4	3	19
5	4	4	4	2	19
5	4	4	4	2	19
5	4	4	4	2	19
4	4	4	4	2	18
4	4	4	4	5	21
4	5	5	5	1	20
5	4	4	4	2	19
5	4	4	4	2	19
5	4	4	4	2	19
5	5	5	4	3	22
5	4	4	5	1	19
5	4	4	4	2	19
2	4	3	2	2	13
5	4	5	4	2	20
4	5	4	5	2	20
5	4	4	4	2	19
5	4	5	5	2	21
5	4	4	4	1	18
4	5	5	4	2	20
4	5	5	5	3	22
4	4	5	3	2	18
4	5	5	4	1	19
4	5	4	4	2	19
4	4	4	4	1	17
5	5	5	4	2	21
4	5	5	4	2	20
4	5	5	4	2	20
5	4	5	4	1	19
5	5	5	5	1	21
5	4	4	4	2	19
4	5	4	4	2	19
5	4	4	4	2	19
4	4	5	5	2	20
5	5	5	4	2	21
4	4	4	5	3	20
5	4	4	4	5	22

5	4	4	4	2	19
4	5	4	4	1	18
5	4	4	4	2	19
4	5	5	4	2	20
5	4	4	5	1	19
5	4	4	5	2	20
4	5	5	5	2	21

PERSENTASE JAWABAN RESPONDEN

FREQUENCIES VARIABLES=X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X21 X2 X23 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

/ORDER=ANALYSIS.

SAVE OUTFILE='C:\Users\hp\Downloads\Documents\DATA KEKE ALL.sav'
/COMPRESSED.

Frequencies

[DataSet0]

Frequency Table

X11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	4.2	4.2	4.2
RAGU RAGU	1	2.1	2.1	6.2
S	13	27.1	27.1	33.3
SS	32	66.7	66.7	100.0
Total	48	100.0	100.0	

X12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	4.2	4.2	4.2
RAGU RAGU	2	4.2	4.2	8.3
S	12	25.0	25.0	33.3
SS	32	66.7	66.7	100.0
Total	48	100.0	100.0	

X13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid RAGU RAGU	1	2.1	2.1	2.1

S	31	64.6	64.6	66.7
SS	16	33.3	33.3	100.0
Total	48	100.0	100.0	

X14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	2.1	2.1	2.1
RAGU RAGU	1	2.1	2.1	4.2
S	29	60.4	60.4	64.6
SS	17	35.4	35.4	100.0
Total	48	100.0	100.0	

X15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	2.1	2.1	2.1
RAGU RAGU	3	6.2	6.2	8.3
S	34	70.8	70.8	79.2
SS	10	20.8	20.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	

X16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid RAGU RAGU	1	2.1	2.1	2.1
S	19	39.6	39.6	41.7
SS	28	58.3	58.3	100.0
Total	48	100.0	100.0	

X17

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid RAGU RAGU	1	2.1	2.1	2.1
S	33	68.8	68.8	70.8
SS	14	29.2	29.2	100.0
Total	48	100.0	100.0	

X21

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2.1	2.1	2.1
	RAGU RAGU	1	2.1	2.1	4.2
	S	29	60.4	60.4	64.6
	SS	17	35.4	35.4	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

X2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2.1	2.1	2.1
	S	33	68.8	68.8	70.8
	SS	14	29.2	29.2	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

X23

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RAGU RAGU	2	4.2	4.2	4.2
	S	35	72.9	72.9	77.1
	SS	11	22.9	22.9	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	4.2	4.2	4.2
	S	19	39.6	39.6	43.8
	SS	27	56.2	56.2	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	32	66.7	66.7	66.7
	SS	16	33.3	33.3	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RAGU RAGU	2	4.2	4.2	4.2
	S	29	60.4	60.4	64.6
	SS	17	35.4	35.4	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2.1	2.1	2.1
	RAGU RAGU	2	4.2	4.2	6.2
	S	34	70.8	70.8	77.1
	SS	11	22.9	22.9	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	10	20.8	20.8	20.8
	TS	30	62.5	62.5	83.3
	RAGU RAGU	6	12.5	12.5	95.8
	SS	2	4.2	4.2	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

IDENTITAS RESPONDEN

Statistics

		usia	jenis kelamin	pekerjaan	pendidikan
N	Valid	48	48	48	48
	Missing	0	0	0	0

Frequency Table

usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25 sampai 35 tahun	18	37.5	37.5	37.5
	36 sampai 45 tahun	17	35.4	35.4	72.9
	diatas 45 tahun	13	27.1	27.1	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki laki	26	54.2	54.2	54.2
	perempuan	22	45.8	45.8	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	45	93.8	93.8	93.8
	lainnya	3	6.2	6.2	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	16	33.3	33.3	33.3
	D3	4	8.3	8.3	41.7
	S1-S2	28	58.3	58.3	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

VALIDITAS DAN RELIABILITAS

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 TOTALX1
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=X21 X2 X23 TOTALX2
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 TOTALY
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

RELIABILITY

```

/VARIABLES=X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X21 X2 X23 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

[DataSet1] H:\ \skripsi\KEKE\DATA KEKE ALL.sav

Scale: ALL VARIABLES**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	48	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	48	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.834	15

Correlations

[DataSet1] H:\ \skripsi\KEKE\DATA KEKE ALL.sav

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y
Y1	Pearson Correlation	1	-.229	.206	.391**	-.139	.522**
	Sig. (2-tailed)		.117	.161	.006	.347	.000
	N	48	48	48	48	48	48
Y2	Pearson Correlation	-.229	1	.567**	.204	-.140	.394**
	Sig. (2-tailed)	.117		.000	.164	.342	.006
	N	48	48	48	48	48	48
Y3	Pearson Correlation	.206	.567**	1	.384**	-.165	.664**
	Sig. (2-tailed)	.161	.000		.007	.264	.000
	N	48	48	48	48	48	48
Y4	Pearson Correlation	.391**	.204	.384**	1	-.141	.663**
	Sig. (2-tailed)	.006	.164	.007		.338	.000
	N	48	48	48	48	48	48
Y5	Pearson Correlation	-.139	-.140	-.165	-.141	1	.322*
	Sig. (2-tailed)	.347	.342	.264	.338		.026
	N	48	48	48	48	48	48
Y	Pearson Correlation	.522**	.394**	.664**	.663**	.322*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000	.000	.026	
	N	48	48	48	48	48	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

[DataSet1] H:\ \skripsi\KEKE\DATA KEKE ALL.sav

Correlations

		X21	X2	X23	X2
X21	Pearson Correlation	1	.762**	.448**	.909**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000
	N	48	48	48	48
X2	Pearson Correlation	.762**	1	.365*	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000		.011	.000
	N	48	48	48	48
X23	Pearson Correlation	.448**	.365*	1	.697**
	Sig. (2-tailed)	.001	.011		.000
	N	48	48	48	48
X2	Pearson Correlation	.909**	.871**	.697**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	48	48	48	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

[DataSet1] H:\ \skripsi\KEKE\DATA KEKE ALL.sav

Correlations

		X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X1
X11	Pearson Correlation	1	.945**	.088	.331*	.539**	.414**	.214	.846**
	Sig. (2-tailed)		.000	.554	.021	.000	.003	.144	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X12	Pearson Correlation	.945**	1	.101	.287*	.522**	.426**	.165	.829**
	Sig. (2-tailed)	.000		.494	.048	.000	.003	.262	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X13	Pearson Correlation	.088	.101	1	.513**	.107	-.034	.247	.402**
	Sig. (2-tailed)	.554	.494		.000	.469	.821	.090	.005
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X14	Pearson Correlation	.331*	.287*	.513**	1	.550**	.135	.503**	.715**
	Sig. (2-tailed)	.021	.048	.000		.000	.360	.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X15	Pearson Correlation	.539**	.522**	.107	.550**	1	.159	.375**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.469	.000		.281	.009	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48

X16	Pearson Correlation	.414**	.426**	-.034	.135	.159	1	-.422**	.400**
	Sig. (2-tailed)	.003	.003	.821	.360	.281		.003	.005
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X17	Pearson Correlation	.214	.165	.247	.503**	.375**	-.422**	1	.435**
	Sig. (2-tailed)	.144	.262	.090	.000	.009	.003		.002
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X1	Pearson Correlation	.846**	.829**	.402**	.715**	.752**	.400**	.435**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.005	.000	.000	.005	.002	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI REGRESI DAN ASUMSI KLASIK

Regression

[DataSet1] H:\ \skripsi\KEKE\DATA KEKE ALL.sav

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	19.3125	1.58660	48
X1	30.6250	2.85557	48
X2	12.7292	1.39512	48

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.722 ^a	.522	.500	1.12141	.522	24.540	2	45	.000	2.138

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.722 ^a	.522	.500	1.12141	.522	24.540	2	45	.000	2.138

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	61.722	2	30.861	24.540	.000 ^a
Residual	56.591	45	1.258		
Total	118.313	47			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Partial	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	6.462	1.843		3.505	.001	2.749	10.175						
X1	.274	.072	.493	3.809	.000	.129	.419	.679	.494	.393	.635	1.575	
X2	.351	.147	.308	2.384	.021	.054	.647	.606	.335	.246	.635	1.575	

a. Dependent Variable: Y

Coefficient Correlations^a

Model		X2	X1
1	Correlations	X2	1.000
		X1	-.604
	Covariances	X2	.022
		X1	-.006

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions
-------	---------	------------	-----------------	----------------------

on				(Constant)	X1	X2
1	1	2.991	1.000	.00	.00	.00
	2	.006	22.640	.69	.00	.60
	3	.004	28.938	.30	1.00	.40

a. Dependent Variable: Y

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.09729520
Most Extreme Differences	Absolute	.153
	Positive	.153
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		1.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.211
a. Test distribution is Normal.		

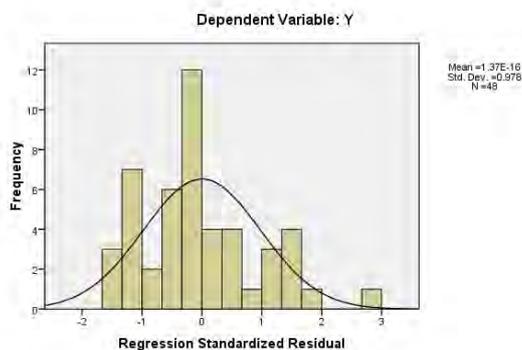
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.6921	.9464	.8401	.05502	48
Residual	-.74856	2.15283	.00000	.69306	48
Std. Predicted Value	-2.689	1.934	.000	1.000	48
Std. Residual	-1.057	3.039	.000	.978	48

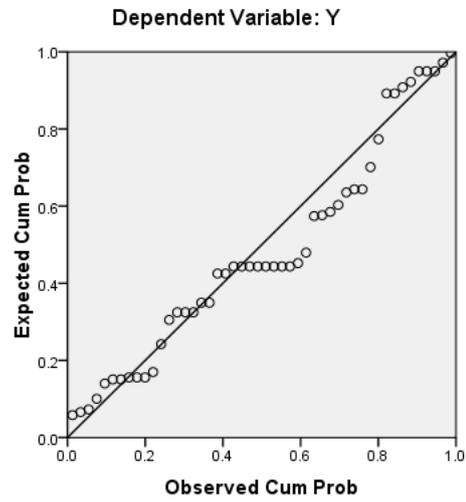
a. Dependent Variable: RES2

Charts

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

